

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoretis

2.1.1 Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih merupakan kajian penting dalam ilmu politik karena menentukan arah dan kualitas demokrasi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, dinamika perilaku pemilih mengalami perkembangan signifikan pasca reformasi, ketika masyarakat mulai memiliki kebebasan politik yang lebih besar. Buku *Kuasa Rakyat* oleh Mujani, Liddle, dan Ambardi (2012) memberikan landasan teoritis dan empiris tentang bagaimana rakyat Indonesia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Buku ini memadukan berbagai pendekatan dalam menjelaskan preferensi politik masyarakat Indonesia. Kajian ini membedakan antara pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional untuk melihat bagaimana identitas, emosi, dan perhitungan logis mempengaruhi pilihan. Penelitian dalam buku tersebut juga menekankan pentingnya konteks sosial dan institusional dalam membentuk perilaku pemilih. Dengan demikian, buku *Kuasa Rakyat* menjadi acuan penting untuk memahami demokrasi elektoral di Indonesia.

Pendekatan sosiologis dalam perilaku pemilih menitikberatkan pada pengaruh faktor sosial seperti agama, etnis, kelas sosial, dan tempat tinggal terhadap pilihan politik seseorang. Dalam *Kuasa Rakyat*, penulis mengamati bahwa afiliasi keagamaan memiliki dampak besar terhadap pola memilih,

terutama di daerah-daerah dengan homogenitas religius tinggi. Etnisitas juga memainkan peran penting, terutama di daerah dengan latar belakang multietnis. Misalnya, di beberapa daerah pemilih lebih cenderung memilih calon dari etnis atau kelompok yang sama karena adanya rasa keterikatan dan kepercayaan. Kelas sosial juga memengaruhi preferensi politik, di mana masyarakat dari kelas bawah sering kali lebih rentan terhadap politik uang. Tempat tinggal, seperti perbedaan antara kota dan desa, juga menciptakan variasi dalam akses informasi dan partisipasi politik. Semua elemen ini menunjukkan bahwa perilaku memilih bukan hanya soal preferensi individu, tetapi juga ditentukan oleh struktur sosial yang kompleks.

Selain pendekatan sosiologis, *Kuasa Rakyat* juga mengupas pendekatan psikologis yang menjelaskan perilaku pemilih melalui identifikasi partai dan loyalitas politik. Identifikasi partai merupakan kecenderungan jangka panjang seseorang untuk mendukung partai tertentu, biasanya dibentuk sejak dini oleh keluarga dan lingkungan. Loyalitas ini bersifat emosional dan cenderung stabil, meskipun bisa berubah akibat pengalaman politik tertentu. Penelitian menunjukkan bahwa pemilih yang memiliki identifikasi kuat terhadap partai politik tertentu akan tetap setia, bahkan saat kinerja partai tersebut buruk. Namun, dalam konteks Indonesia, loyalitas ini sering kali tidak sekuat di negara-negara demokrasi mapan. Banyak pemilih yang bersifat swing voters, berpindah-pindah pilihan antar pemilu. Faktor-faktor seperti ketokohan calon, isu aktual, dan kampanye yang menarik bisa menggeser preferensi pemilih.

Oleh karena itu, pendekatan psikologis tetap relevan namun harus dipahami dalam konteks dinamisnya politik Indonesia.

Pendekatan ketiga yang dibahas dalam buku ini adalah pendekatan rasional atau rational choice theory, yang mengasumsikan bahwa pemilih bertindak logis dan rasional dalam menentukan pilihannya. Pemilih dinilai mempertimbangkan manfaat dan biaya dari setiap pilihan politik yang tersedia. Dalam konteks ini, pemilih akan memilih calon atau partai yang dinilai paling mampu memenuhi kepentingan mereka, baik secara ekonomi, sosial, maupun kebijakan. Model ini sangat menekankan pada individu sebagai agen yang otonom dan sadar atas keputusan politiknya. Dalam praktiknya, pendekatan ini membantu menjelaskan perilaku pemilih yang tidak punya afiliasi tetap, tetapi membuat keputusan berdasarkan evaluasi kinerja dan janji politik. Misalnya, saat pemilih merasa pemerintah gagal memenuhi janji kampanye, mereka cenderung menghukum partai penguasa dengan tidak memilihnya kembali. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemilih Indonesia tidak sekadar emosional, tetapi juga rasional dalam situasi tertentu.

Buku *Kuasa Rakyat* menegaskan bahwa ketiga pendekatan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam menjelaskan perilaku pemilih. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, kompleksitas identitas sosial dan dinamika politik membuat perilaku pemilih tidak bisa dijelaskan secara tunggal. Penulis mengadopsi pendekatan integratif dengan menyatukan elemen sosiologis, psikologis, dan rasional dalam satu model perilaku pemilih. Hal ini menjadi kekuatan utama buku ini karena tidak terjebak pada satu

perspektif. Integrasi ini juga mencerminkan kenyataan di lapangan, di mana pemilih bisa memilih karena identitas, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak kandidat dan kepentingan pribadinya. Misalnya, seseorang bisa memilih partai tertentu karena kedekatan agama, tetapi pada saat yang sama menilai kandidatnya dari sisi kompetensi dan program kerja. Pendekatan ini membantu memahami perilaku pemilih secara utuh.

Penelitian dalam *Kuasa Rakyat* menggunakan data empiris dari survei nasional, yang memperkuat argumen teoritis dalam buku ini. Survei dilakukan secara metodologis dan representatif terhadap berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Melalui data ini, penulis dapat mengidentifikasi pola-pola umum dan pengecualian dalam perilaku memilih. Misalnya, ditemukan bahwa pemilih dari kalangan berpendidikan tinggi lebih rasional dalam memilih, sementara pemilih dari kalangan kurang terdidik lebih cenderung mengandalkan loyalitas atau pengaruh sosial. Survei juga menunjukkan bahwa kampanye politik dan media memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Selain itu, interaksi langsung antara kandidat dan pemilih, seperti melalui blusukan atau kegiatan sosial, juga berpengaruh terhadap keputusan memilih. Dengan data ini, buku *Kuasa Rakyat* tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berbasis pada realitas empiris.

2.1.2 Konsep Gender dalam Politik

Konsep gender dalam politik menekankan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukanlah semata-mata persoalan biologis, melainkan hasil konstruksi sosial yang membentuk akses dan posisi dalam kekuasaan politik.

Norma-norma patriarkal dalam masyarakat kerap menghambat keterlibatan perempuan dalam lembaga politik seperti partai dan legislatif. Kendati kebijakan kuota 30% telah diterapkan dalam sistem pemilu Indonesia, kendala kultural dan sosial tetap membatasi partisipasi yang bermakna. Representasi formal perempuan dalam politik seringkali tidak menjamin pengaruh nyata dalam pengambilan kebijakan. Dengan perspektif gender, hambatan ini dilihat sebagai struktur yang terlembaga dalam budaya politik dan bukan sesuatu yang alamiah. Oleh karena itu, transformasi nilai, institusi, dan norma menjadi hal yang sangat penting. Gender politics menuntut partai politik untuk tidak hanya menerima perempuan secara simbolis, tetapi juga memberi ruang bagi suara dan agenda politik perempuan. Representasi yang bermakna adalah syarat mutlak bagi demokrasi yang inklusif (Pramudita et al., 2023; Aspinall et al., 2021).

Implementasi kuota gender dalam partai politik Indonesia memang telah meningkatkan jumlah perempuan dalam struktur formal partai, namun masih banyak yang sekadar memenuhi kuota tanpa komitmen untuk perubahan mendasar. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua tipe partai: kooptif dan responsif. Partai kooptif hanya menggunakan perempuan sebagai pemenuhan administratif, sedangkan partai responsif aktif mendorong perempuan dalam proses pengambilan kebijakan (Ekawati et al., 2025). Konsep gender dalam politik menggarisbawahi pentingnya perubahan struktural agar kuota tersebut tidak berhenti pada angka semata. Perempuan harus diberi pelatihan politik, akses ke jaringan kekuasaan, dan partisipasi dalam forum strategis. Jika partai

politik tidak mengubah budaya internal yang masih bias gender, maka kuota tidak akan menghasilkan representasi substantif. Demokrasi yang inklusif tidak hanya diukur dari keterwakilan numerik, tetapi juga kualitas kontribusi dalam kebijakan publik. Politik berperspektif gender menuntut kesetaraan dalam substansi dan proses politik. Maka dari itu, transformasi partai menjadi aktor yang progresif terhadap isu gender sangat krusial (Ekawati et al., 2025).

Budaya patriarkal yang bercampur dengan nilai-nilai keagamaan konservatif menjadi faktor penghambat keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia. Survei yang dilakukan oleh Aspinall et al. (2021) menunjukkan bahwa lebih dari 60% masyarakat masih percaya bahwa laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin. Selain itu, banyak yang masih meyakini bahwa perempuan harus mendapat izin dari suami untuk terlibat dalam kegiatan publik. Konsep gender dalam politik menjelaskan bahwa norma-norma ini adalah bentuk pembakuan peran yang mempersempit ruang gerak perempuan. Meningkatkan partisipasi politik perempuan harus dimulai dari pendidikan kesetaraan dan kampanye kesadaran publik yang konsisten. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, kecenderungan untuk mendukung keterlibatan politik perempuan juga meningkat. Dengan demikian, literasi politik dan gender menjadi alat utama untuk mengubah nilai-nilai patriarkal yang telah mengakar. Proyek transformasi ini tidak cukup dengan pendekatan legal-formal semata. Perlu kerja budaya yang sistematis dan berkelanjutan (Aspinall et al., 2021).

Representasi perempuan dalam media massa dan ruang digital juga menjadi isu penting dalam politik gender. Sering kali perempuan politisi

dipotret hanya dari sisi penampilan, peran domestik, atau emosionalitas, bukan dari substansi ide dan kapasitas kepemimpinannya. Framing seperti ini bukan saja mengaburkan kemampuan perempuan, tetapi juga memperkuat stereotip negatif yang melemahkan legitimasi mereka. Media memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik dan memperkuat struktur kekuasaan simbolik. Oleh karena itu, perlu ada pelatihan bagi jurnalis agar memiliki perspektif gender dalam memberitakan perempuan politisi. Media yang objektif dan adil akan berkontribusi pada peningkatan legitimasi perempuan dalam ranah politik. Gender politics dalam konteks media menuntut perubahan narasi ke arah yang lebih inklusif. Tanpa dukungan media yang adil, keterlibatan perempuan akan terus dibatasi oleh stigma dan prasangka (Susilo et al., 2024; Riduansyah et al., 2024).

Hambatan budaya dan struktural dalam partai politik menjadi tantangan besar dalam mewujudkan keterwakilan perempuan yang sejati. Meskipun secara formal terdapat kuota, namun budaya internal partai sering kali masih bernuansa patriarkal dan eksklusif. Penentuan calon legislatif lebih banyak ditentukan oleh elite laki-laki yang memegang jaringan kekuasaan. Perempuan yang ingin mencalonkan diri harus memiliki jaringan kuat atau dukungan dari elite yang berkuasa. Konsep gender dalam politik mendorong perlunya reformasi sistem rekrutmen partai agar lebih adil gender. Proses seleksi harus lebih transparan dan berbasis kompetensi, bukan sekadar hubungan personal. Selain itu, perlu ada penguatan kapasitas kader perempuan melalui pelatihan

dan mentoring yang berkelanjutan. Jika struktur internal partai tidak berubah, maka representasi perempuan akan tetap stagnan (Pramudita et al., 2023).

Penelitian Aspinall et al. (2021) menemukan bahwa masalah utama rendahnya jumlah calon perempuan berasal dari dua sisi: suplai dan permintaan. Di sisi suplai, perempuan sering kali merasa tidak memiliki kapasitas atau tidak cukup termotivasi untuk mencalonkan diri. Sementara di sisi permintaan, partai politik enggan mengusung perempuan karena dianggap tidak elektabilitas. Kedua hambatan ini memperkuat ketimpangan gender dalam politik. Konsep gender politics menekankan bahwa solusi dari hambatan ini adalah dengan menyediakan dukungan institusional yang kuat, seperti pendanaan kampanye, pelatihan kepemimpinan, dan akses jaringan politik. Dengan adanya fasilitas tersebut, perempuan dapat lebih percaya diri dan kompetitif dalam kontestasi politik. Perubahan ini harus didorong dari dalam sistem partai maupun dari regulasi pemerintah. Upaya ini akan menghasilkan supply-demand politik yang adil gender (Aspinall et al., 2021).

Di era digital, keterlibatan perempuan dalam politik juga dipengaruhi oleh sistem algoritma dan representasi dalam media sosial. Penelitian Golovchenko et al. (2023) menunjukkan bahwa perempuan politisi mendapatkan visibilitas online yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini dipengaruhi oleh bias algoritmik yang bekerja secara sistematis dalam platform digital. Konsep gender dalam politik modern perlu mencakup isu-isu keadilan digital. Platform media sosial harus melakukan audit algoritma dan mendorong keterwakilan yang setara dalam visibilitas politik. Selain itu,

perempuan politisi juga perlu mendapatkan literasi digital agar mampu memanfaatkan media sosial secara strategis. Jika tidak, mereka akan terus berada dalam bayang-bayang algoritma yang diskriminatif. Gender politics harus merambah ke wilayah digital agar kesetaraan tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga ruang daring. Visibilitas politik adalah bagian penting dari legitimasi publik (Golovchenko et al., 2023).

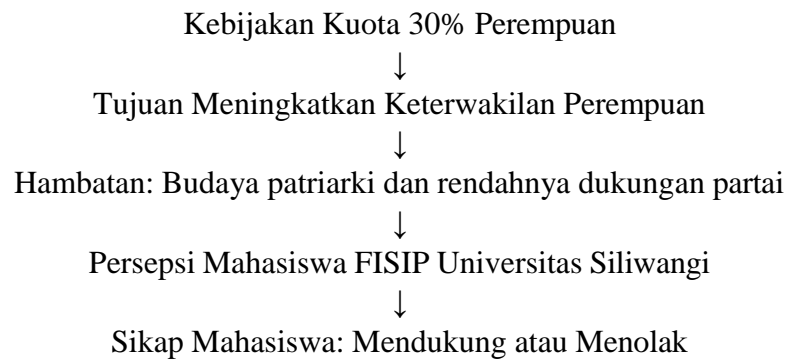
Framing media terhadap perempuan dalam kontestasi politik nasional juga masih mengandung bias yang signifikan. Anggoro et al. (2024) mencatat bahwa dalam Pilpres 2024, perempuan sering digambarkan sebagai calon pendamping laki-laki, bukan sebagai pemimpin utama. Narasi ini memperkuat persepsi publik bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin tertinggi negara. Konsep gender menekankan pentingnya framing media yang adil dan berbasis pada kapasitas, bukan jenis kelamin. Media harus mempromosikan narasi yang menekankan visi, program, dan kompetensi, bukan sekadar atribut personal. Framing yang netral gender akan membantu membentuk opini publik yang lebih setara dan progresif. Jurnalisme yang berperspektif gender adalah kunci menuju politik yang lebih inklusif. Oleh karena itu, perlu ada edukasi media dan pengawasan terhadap narasi yang disebarkan ke publik (Anggoro et al., 2024).

Interaksi antara nilai budaya lokal dan gender juga memainkan peran dalam mempengaruhi representasi politik perempuan di daerah. Misalnya, di daerah seperti Banyumas, norma agama dan adat lokal menjadi faktor pembatas bagi perempuan untuk tampil dalam arena politik. Budaya lokal

kerap membingkai perempuan sebagai penjaga moral dan domestik, bukan sebagai pemimpin publik. Konsep gender dalam politik melihat ini sebagai tantangan struktural yang harus diatasi dengan pendekatan kontekstual. Pendidikan politik berbasis komunitas menjadi penting untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. Selain itu, pelibatan tokoh lokal dan perempuan berpengaruh dapat membantu membongkar norma yang menghambat. Strategi ini tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi memerlukan proses panjang dan konsisten. Gender politics di tingkat lokal harus dilaksanakan secara partisipatif dan inklusif (Maula, 2024).

Secara keseluruhan, konsep gender dalam politik membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan lintas sektor. Ini mencakup representasi formal, partisipasi substansial, transformasi budaya politik, serta keadilan dalam media dan platform digital. Studi-studi yang dilakukan dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kendala terhadap keterwakilan perempuan bersifat struktural, bukan individual semata (Pramudita et al., 2023; Ekawati et al., 2025; Aspinall et al., 2021). Oleh karena itu, strategi perubahan harus diarahkan pada reformasi partai, pelibatan media, dan kebijakan negara yang berpihak gender. Literasi gender juga harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan politik di berbagai jenjang. Tanpa itu, kesenjangan akan terus terpelihara dalam sistem demokrasi. Gender politics bukan hanya tentang perempuan dalam politik, tetapi bagaimana politik mengubah diri agar adil bagi semua jenis kelamin. Ini adalah prasyarat bagi demokrasi yang substansial dan berkeadaban.

2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilandasi oleh keberadaan kebijakan afirmatif berupa kuota 30% bagi perempuan dalam pencalonan legislatif yang telah diatur dalam perundang-undangan pemilu. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam ranah politik serta memperkuat representasi mereka dalam proses pengambilan keputusan publik.

Meski secara normatif kebijakan ini menunjukkan komitmen negara terhadap kesetaraan gender, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala struktural dan kultural. Salah satu hambatan paling dominan adalah budaya patriarki, yang masih mengakar dalam masyarakat dan menyebabkan keraguan terhadap kemampuan perempuan dalam dunia politik. Di samping itu, lemahnya dukungan dari partai politik dan minimnya pengarusutamaan gender dalam pendidikan politik turut menjadi faktor penghambat keterwakilan perempuan secara substansial.

Dalam konteks ini, mahasiswa FISIP Universitas Siliwangi dipandang sebagai kelompok strategis yang dapat merepresentasikan pemikiran generasi

muda terkait isu-isu kesetaraan gender dan politik. Persepsi mereka terhadap kebijakan kuota perempuan menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas internalisasi nilai-nilai demokrasi dan keadilan di lingkungan kampus.

Sikap yang ditunjukkan oleh mahasiswa, baik yang mendukung maupun menolak kebijakan tersebut, sangat menentukan arah keberlanjutan kebijakan afirmatif ini. Apabila mahasiswa mendukung, hal ini akan memperkuat legitimasi dan penerimaan terhadap kebijakan kuota. Sebaliknya, apabila mereka menolak, hal tersebut dapat menjadi sinyal bahwa masih terdapat resistensi sosial terhadap upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik.